

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini Kementerian Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan, secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 (*Netto*) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.311.501.480.930,00 atau mencapai 112,77% dari estimasi Pendapatan sebesar Rp9.143.922.808.160,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 (*Netto*) adalah sebesar Rp48.852.631.450.598,00 atau mencapai 89,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp54.337.519.430.000,00 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran TA 2015 dan 2014

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2015			TA 2014
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	9.143.922.808.160,00	10.311.501.480.930,00	112,77	9.802.273.167.768,00
Belanja Negara	54.337.519.430.000,00	48.852.631.450.598,00	89,91	47.471.735.913.892,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 dan 2014.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp45.221.782.369.253,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp5.853.058.939.701,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp38.772.063.438.275,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp2.708.447.093,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp593.951.544.184,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.060.072.481.404,00 dan Rp44.161.709.887.849,00

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014*

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2015	31 Des 2014	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	5.853.058.939.701,00	5.619.539.386.566,00	233.519.553.135,00	4,16
Aset Tetap	38.772.063.438.275,00	36.369.065.361.645,00	2.402.998.076.630,00	6,61
Piutang Jangka Panjang	2.708.447.093,00	748.643.516,00	1.959.803.577,00	261,78
Aset Lainnya	593.951.544.184,00	1.303.059.081.802,00	(709.107.537.618,00)	(54,42)
Jumlah Aset	45.221.782.369.253,00	43.292.412.473.529,00	1.929.369.895.724,00	4,46
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.060.072.481.404,00	1.016.936.107.723,00	43.136.373.681,00	4,24
Ekuitas Dana				
Ekuitas	44.161.709.887.849,00	42.275.476.365.806,00	1.886.233.522.043,00	4,46
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	45.221.782.369.253,00	43.292.412.473.529,00	1.929.369.895.724,00	4,46

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.825.703.886.896,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp48.234.413.622.963,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp38.408.709.736.067,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp115.611.682.751,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp38.293.098.053.316,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi adanya kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp42.295.954.922.184,00 Adapun mutasi tahun 2015 yaitu: Pengurangan karena Defisit-LO sebesar Rp38.293.098.053.316,00, penambahan dari penyesuaian nilai Aset sebesar Rp71.436.664.304,00, penambahan dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi terdiri dari: koreksi nilai Persediaan Rp31.214.401.328,00, selisih Revaluasi Aset Tetap Rp389.343.679,00, koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp622.002.473.137,00, dan koreksi Lain-lain sebesar Rp392.520.811.692,00. Penambahan dari Transaksi Antar Entitas sebesar Rp39.041.289.324.771,00 Total Mutasi Tahun 2015 terjadi kenaikan Entitas sebesar Rp1.865.754.965.665,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp44.161.709.887.849,00 = (Rp42.295.954.922.184,00 + Rp1.865.754.965.665,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

5.1. Informasi penting Pelaksanaan anggaran

- 1) Jumlah Satker Kemenkes TA 2015 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 1.321 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp54.337.519.430.000,00 Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2015. Jumlah DIPA sebanyak 1.321 Satker, dengan rincian sesuai Jenis Kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN, yaitu : Kantor Pusat (KP) sebanyak 46 Satker, Kantor Daerah (KD) sebanyak 168 Satker, Dekonsentrasi (DK) sebanyak 170 Satker, Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 937 Satker.
- 2) Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan

telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

5.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2015

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Kantor Daerah (UPT) dan Dekonsentrasi seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dari:
 - Satuan Kerja → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan
 - Satker Tugas Pembantuan → Eselon I → Kementerian Kesehatan
- 2) Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/207/2015 tentang Pembentukan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes, sedangkan Unit Akuntansi Wilayah Dekonsentrasi dibentuk oleh masing-masing Kepala Daerah (Gubernur) atau Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 3) Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Eselon I (UAPPA/B-E1) dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun 2015 telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- 5) Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan barang milik negara di tingkat Satuan Kerja, telah dilakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tata cara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.3. Beberapa Surat dan Edaran oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2015.

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Pusat;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga;
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Tahun Anggaran;
 - 6) Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-887/KN/2015 tanggal 7 Juli 2015 Hal Pemberitahuan *Launching* Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK BMN Berbasis Akrual Tingkat Satuan Kerja;
 - 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6324/PB/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang TA 2015;
 - 8) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6332/PB/2015 tanggal 10 Juli 2015 hal Pengesahan dan/atau Revisi DIPA BLU atas Pendapatan Hibah BLU dalam bentuk barang/jasa;
 - 9) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1690/PB/2015 tentang Penatausahaan Dokumen Sumber dalam rangka Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015;
 - 10) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11231/PB/2015 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2015;
 - 11) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-670/PB/2016 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - 12) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-6478/PB.6/2015 tentang Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan;
 - 13) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-261/PB/2016 hal Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015;
 - 14) Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-334/PB.6/2016 tentang Dispensasi Penyelesaian SPM-TUP Nihil, SPM-GUP Nihil, SP3B-BLU, SP2HL, dan MPHL-BJS TA 2015.

5.4. Kemenkes telah menerbitkan Peraturan dan Kebijakan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2015.

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/489/2014 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Kesehatan;
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/207/2015 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Vertikal;
- 4) Surat Menteri Kesehatan nomor KU.02.02/III/2590/2015 tentang Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan TA 2015;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

5.5. Kejadian Penting setelah tanggal 31 Desember 2015, antara lain :

- 1) Telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Negara atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2015, sebesar Rp1.827.265.090,00 pada bulan Januari 2016;
- 2) Telah dilakukan pertemuan tiga pihak antara Kemenkes, Kemenkeu dan BPK RI melalui Nota Kesepakatan Nomor NK 059 Tanggal 19 April 2016 Angka Asersi Final Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan (BA 024) tahun 2015 yang dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 (*Audited*);
- 3) Dari pertemuan tiga pihak Kementerian Kesehatan telah melakukan tindak lanjut antara lain:
 - a) Pemantauan lebih lanjut atas proses pengesahan belanja hibah langsung dan pengesahan pendapatan/belanja BLU;
 - b) Terkait Pelaksanaan Tim Nusantara Sehat periode II Tahun 2015, sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 terdapat pengembalian belanja senilai Rp7.806.210.078,00 pengembalian belanja ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah terpencil dan sangat terpencil serta pemahaman atas belanja Negara yang melibatkan masyarakat umum yang tergabung dalam Tim Nusantara Sehat dan seluruh pengembalian belanja tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara;

- 4) Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal atas data BMN pada SAIBA dan SIMAK-BMN, dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Rekonsiliasi BMN pada SAIBA dan SIMAK-BMN TA 2015

(dalam rupiah)

URAIAN AKUN	SAIBA	SIMAK-BMN	SELISIH
PERSEDIaan	1.730.272.808.049,00	1.862.227.919.924,00	(131.955.111.875,00)
	1.730.272.808.049,00	1.862.227.919.924,00	(131.955.111.875,00)
TANAH	14.892.571.159.833,00	14.892.571.159.833,00	-
PERALATAN DAN MESIN	26.758.033.064.347,00	26.906.165.742.447,00	(148.132.678.100,00)
GEDUNG DAN BANGUNAN	11.755.589.360.974,00	11.755.589.327.974,00	(8.967.000,00)
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	576.869.315.193,00	576.869.315.193,00	-
ASET TETAP LAINNYA	239.548.677.095,00	239.548.677.095,00	-
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3.135.212.107.588,00	3.135.203.140.588,00	8.967.000,00
	57.357.823.685.030,00	57.505.956.363.130,00	(148.132.678.100,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18.585.760.246.755,00)	(18.703.408.978.404,00)	117.648.731.649,00
	38.772.063.438.275,00	38.802.547.384.726,00	(30.483.946.451,00)
ASET TIDAK BERWUJUD	177.195.207.838,00	177.164.317.638,00	30.890.200,00
ASET LAIN-LAIN	1.633.206.625.722,00	11.880.011.919.152,00	(10.246.805.293.430,00)
	1.810.401.833.560,00	12.057.176.236.790,00	(10.246.774.403.230,00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.228.645.773.808,00)	(9.153.699.938.645,00)	7.925.054.164.837,00
	581.756.059.752,00	2.903.476.298.145,00	(2.321.720.238.393,00)
TOTAL ASET SEBELUM PENYUSUTAN	60.898.498.326.639,00	71.425.360.519.844,00	(10.526.862.193.205,00)
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	(19.814.406.020.563,00)	(27.857.108.917.049,00)	8.042.702.896.486,00
TOTAL ASET SETELAH PENYUSUTAN	41.084.092.306.076,00	43.568.251.602.795,00	(2.484.159.296.719,00)

Berdasarkan data tersebut di atas secara total terdapat perbedaan total aset sebelum penyusutan SAIBA lebih rendah dari SIMAK-BMN sebesar Rp10.526.862.193.205,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Persediaan**, data SAIBA sebesar Rp1.730.272.808.049,00 dan SIMAK-BMN sebesar Rp1.862.227.919.924,00 SAIBA lebih rendah sebesar Rp131.955.111.875,00 perbedaan ini disebabkan :

Barang persediaan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah namun belum selesai proses hibahnya, dikeluarkan dari aplikasi SAIBA dan tetap disajikan di SIMAK-BMN, terjadi pada :

KODE ESELON I	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SAIBA	SIMAK-BMN	SELISIH
02405	465833	DIREKTORAT PPML	237.778.678.103,00	265.685.795.719,00	(27.907.117.616,00)
02405	465842	DIREKTORAT PPBB	33.225.932.336,00	63.011.443.786,00	(29.785.511.450,00)
02405	465858	DIREKTORAT SIMKAR-KESMA	266.601.494.945,00	315.599.293.126,00	(48.997.798.181,00)
02405	465864	DIREKTORAT PL	5.047.214.202,00	29.619.569.402,00	(24.572.355.200,00)
02411	416176	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOLOGI DAN STATUS KESEHATAN	5.168.455,00	1.341.618.455,00	(1.336.450.000,00)
JUMLAH			542.658.488.041,00	675.257.720.488,00	(132.599.232.447,00)

Selain itu terdapat perbedaan nilai persediaan pada Satker RS Vertikal yaitu :

(dalam rupiah)

KODE ESELON I	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SAIBA	SIMAK-BMN	SELISIH
02404	257847	RS STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	9.224.120.458,00	8.580.759.876,00	643.360.582,00
02404	415491	RS MATA CICENDO BANDUNG	7.218.571.185,00	7.217.811.195,00	759.990,00
JUMLAH			16.442.691.643,00	15.798.571.071,00	644.120.572,00

b. **Aset Tetap**, sebelum penyusutan data SAIBA sebesar Rp57.357.823.685.030,00 dan SIMAK-BMN sebesar Rp57.505.956.363.130,00. Perbedaan SAIBA lebih rendah sebesar Rp148.132.678.100,00 perbedaan ini terjadi pada :

a) Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

KODE ESELON I	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SAIBA	SIMAK-BMN	SELISIH
02404	180845	DINKES KAB. PARIGI MOUTONG	19.462.744.759,00	19.529.987.799,00	(67.243.040,00)
02404	465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN	36.998.751.390,00	142.939.701.390,00	(105.940.950.000,00)
02404	466080	SETDITJEN BUK	214.102.781.101,00	256.227.266.161,00	(42.124.485.060,00)
JUMLAH			270.564.277.250,00	418.696.955.350,00	(148.132.678.100,00)

b) Terdapat perbedaan penyajian akun Aset Tetap pada Satker RS Jiwa Dr. Soeroyo Magelang yaitu data SAIBA menyajikan dalam akun KDP sebesar Rp8.967.000,00 sedangkan SIMAK-BMN menyajikan dalam akun Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.967.000,00.

c. **Aset Lainnya**, sebelum penyusutan data SAIBA sebesar Rp1.810.401.833.560,00 dan SIMAK-BMN sebesar Rp12.057.176.236.790,00, data SAIBA lebih rendah sebesar Rp10.246.774.403.230,00 perbedaan disebabkan :

- Terdapat perbedaan nilai Aset Lain-Lain pada:
 - RS. H. Adam Malik dengan nilai Rp889.911.051,00 yang merupakan dana GAKIN tahun anggaran 2001/2002 sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 2005 sebagai salah satu barang bukti dalam perkara penyalahgunaan dana GAKIN. Pada saat ini pengembalian kas tersebut masih menunggu proses banding atas putusan pengadilan negeri Medan;
 - Aset/BMN hasil pengadaan satker pusat yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah namun belum selesai proses hibahnya, dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN sebesar Rp1.682.831.737.381,00;
 - Aset/BMN Satker DK/TP hasil pengadaan di bawah tahun 2011 namun belum selesai proses hibahnya, dikeluarkan dari Neraca SAIBA tetapi masih dicatat dalam SIMAK-BMN sebesar Rp 8.564.863.467.100,00.

- d. **Akumulasi Penyusutan**, data SAIBA sebesar Rp19.814.406.020.563,00 dan SIMAK-BMN sebesar Rp27.857.108.917.049,00 Perbedaan SIMAK-BMN lebih besar sebesar Rp8.042.702.896.486,00 terjadi karena adanya perbedaan nilai aset tetap dan aset lainnya.

5) **Koreksi Laporan Keuangan Kemenkes TA 2015**

Laporan Keuangan Kemenkes TA 2015 setelah diaudit oleh BPK RI, mengalami perubahan/koreksi internal dan audit Tim BPK berupa penambahan dan pengurangan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kemenkes per 31 Desember 2015.

Langkah-langkah koreksi :

Pada prinsipnya koreksi atas Laporan Keuangan dilakukan setelah penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada Satker terkait dan sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat Satker serta disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan.

Beberapa hal yang dilakukan koreksi/penyesuaian mencakup :

- 1) Target dan Realisasi Pendapatan PNBPN yang belum masuk laporan;
- 2) Pagu dan Realisasi Belanja yang belum masuk laporan, termasuk adanya dokumen SPHL yang baru terbit atas penggunaan dana hibah langsung;
- 3) Pendapatan dan Belanja Satker BLU yang baru mendapatkan pengesahan dari KPPN setempat;
- 4) Koreksi internal yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I;
- 5) Koreksi penambahan/pengurangan nilai pada Akun Neraca sesuai data/dokumen sumber hasil pemeriksaan Tim BPK RI;
- 6) Koreksi terkait data BMN, yaitu :
 - a) Nilai Persediaan Kurang saji, berdasarkan hasil cek fisik
 - b) Koreksi hasil *dropping* BMN kepada Pemerintah Daerah yang masih tercatat dalam akun Persediaan dan Aset Lain-lain.
 - c) Koreksi kurang dan/atau lebih saji Aset Tetap
 - d) Koreksi kurang dan/atau lebih saji nilai KDP terkait kapitalisasi dan prosentase penyelesaian pekerjaan.
- 7) Notulen hasil Kesepakatan Tiga Pihak (Tripartied)
 - a) Permasalahan :

- 1) Barang Persediaan yang telah diserahkan ke Masyarakat/Pemerintah Daerah tidak disajikan dalam Neraca namun tercatat di SIMAK BMN karena proses hibahnya belum ada persetujuan dari DJKN;
- 2) Terdapat penerimaan hibah tahun 2015 berupa barang yang belum disahkan (Belum terbit MPHL-BJS). Barang tersebut telah dicatat pada Neraca dengan akun lawan Hibah Langsung yang Belum Disahkan;
- 3) Terdapat Pengesahan penerimaan Hibah Jasa tahun 2015 yang pelaksanaannya sebelum tahun 2015;
- 4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:
 - a. Koreksi Nilai Persediaan Rp48.696.039.776,00;
 - b. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp389.343.679,00;
 - c. Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi bernilai Rp1.184.780.193.903,00;
 - d. Lain-lain bernilai Rp430.419.948.689,00;
- 5) Tindak lanjut reviu Itjen Kementerian Kesehatan

b) Pembahasan :

- 1) Secara fisik, persediaan tersebut tidak berada/dikuasai oleh Kementerian Kesehatan, sehingga harus dikeluarkan dari Neraca Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan:
 - a. Untuk persediaan yang tidak diserahkan ke Masyarakat dicatat sebagai persediaan;
 - b. Untuk persediaan yang belum diserahkan, dicatat sebagai persediaan;
 - c. Untuk persediaan dan Aset Lainnya yang diserahkan ke masyarakat pada tahun 2015 dikeluarkan dari persediaan dengan akun lawan beban barang diserahkan ke masyarakat;
 - d. Untuk persediaan yang diserahkan sebelum tahun 2015 dikeluarkan dari Persediaan dengan akun lawan koreksi nilai persediaan;
 - e. Untuk Aset Lainnya yang diserahkan sebelum tahun 2015 dikeluarkan dari Aset Lainnya dengan akun lawan koreksi aset tetap non revaluasi.

Pengeluaran persediaan tersebut harus didukung oleh dokumen sumber minimal salah satu dari:

- a. Berita acara serah terima;
- b. Berita acara serah terima operasional;
- c. Surat Bukti Barang Keluar;
- d. Surat Pernyataan/Keterangan oleh KPA/KPB masing-masing Direktorat/Kantor Pusat;

Untuk teknis Aplikasinya, karena Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN belum dapat mengakomodasi hal tersebut di atas, maka pada Aplikasi Persediaan/SIMAK-BMN masih tercantum, dilakukan jurnal penyesuaian di Aplikasi SAIBA;

- 2) Terhadap barang yang belum disahkan sampai LK *Audited*, hibah tersebut tetap dicatat pada Neraca dengan akun lawan Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Penyelesaian selanjutnya dilakukan pada tahun 2016 menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan;
- 3) Berdasarkan basis akrual, pengakuan beban dilakukan pada tahun terjadinya. Terhadap hibah jasa yang dilaksanakan sebelum tahun 2015, walaupun BAST-nya pada tahun 2015, tidak dapat diakui sebagai beban Tahun 2015. Untuk itu perlu dilakukan koreksi dengan mendebet Koreksi Lain-lain dan mengkredit Beban Barang dan Jasa;

Terhadap penerimaan hibah jasa tahun 2015 perlakuannya sebagai berikut:

- a. Bila telah diketahui nilainya, dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebet beban barang dan jasa serta mengkredit Koreksi Lain-lain;
 - b. Bila tidak diketahui nilainya, diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- 4) Tidak terdapat perbedaan antara LK *Unaudited* yang diterima antara Kementerian Keuangan dengan BPK;
 - 5) Penjelasan Dampak kumulatif:
 - a. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp48.696.039.776,00 karena input persediaan yang diperoleh tahun sebelumnya;
 - b. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp389.343.679,00 dari hasil Inventarisasi dan Penilaian DJKN;

- c. Dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp1.184.780.193.903,00 sebesar Rp900.000.000.000,00 merupakan Tanah yang baru diinput pada tahun 2015;
- d. Dari Lain-lain sebesar Rp430.419.948.689,00 terutama dari koreksi piutang BLU tahun yang lalu dan utang.
- 6) Catatan Hasil Reviu Itjen Kemkes telah ditindaklanjuti.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan data *Unaudited* dengan *Audited* meliputi : Estimasi dan Realisasi PNBPN, Anggaran dan Realisasi Belanja, dan Neraca per 31 Desember 2015 :

Tabel 4
Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN TA 2015
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Audited		Unaudited		Koreksi	
	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi	Estimasi	Realisasi
Sekretariat Jenderal	6.070.425.000,00	16.009.346.193,00	6.070.425.000,00	16.007.699.210,00	-	1.646.983,00
Inspektorat Jenderal		17.373.150,00		17.373.150,00	-	-
Ditjen Bina Gizi dan KIA	603.005.000,00	6.727.901.076,00	603.005.000,00	6.356.709.890,00	-	371.191.186,00
Ditjen Bina Upaya Kesehatan	8.380.979.292.140,00	9.403.741.902.860,00	8.380.979.292.140,00	9.402.621.397.985,00	224.000.000,00	1.120.504.875,00
Ditjen PP dan PL	153.574.229.560,00	237.762.682.143,00	153.574.229.560,00	237.762.682.143,00	-	-
Ditjen Binfar dan Alkes	19.762.500.000,00	41.403.708.316,00	19.762.500.000,00	41.380.958.316,00	-	22.750.000,00
Badan Litbang Kesehatan	2.804.525.000,00	6.885.997.146,00	2.804.525.000,00	6.885.997.146,00	-	-
Badan PPSDM Kesehatan	580.128.831.460,00	598.952.570.046,00	577.556.727.301,00	598.952.569.956,00	2.572.104.159,00	90,00
Jumlah	9.143.922.808.160,00	10.311.501.480.930,00	9.141.350.704.001,00	10.309.985.387.796,00	2.796.104.159,00	1.516.093.134,00
					0,03%	0,01%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas :

- a. Estimasi PNBPN Kemenkes TA 2015, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp2.796.104.159,00 atau meningkat sebesar 0,03%, terjadi pada Unit Eselon I Ditjen Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp224.000.000,00 dan Badan PPSDM sebesar Rp2.572.104.159,00;
- b. Realisasi PNBPN Kemenkes TA 2015, mengalami koreksi penambahan sebesar Rp1.516.093.134,00 atau meningkat sebesar 0,01%, terjadi pada Unit Eselon I Setjen sebesar Rp1.646.983,00 Ditjen GIKIA sebesar Rp371.191.186,00 Ditjen BUK sebesar Rp1.120.504.875,00 Ditjen Binfar & Alkes sebesar Rp22.750.000,00 dan Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp90,00.

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Audited		Unaudited		Koreksi	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Sekretariat Jenderal	24.283.609.878,00	22.905.235.230.282,00	24.275.951.783.000,00	22.898.867.285.301,00	7.658.095.000,00	6.367.944.981,00
Inspektorat Jenderal	102.971.000,00	82.715.773.073,00	102.971.000.000,00	82.715.773.073,00	-	-
Ditjen Bina Gizi dan KIA	2.717.469.698,00	2.332.666.144.087,00	756.204.818.000,00	540.930.414.851,00	1.961.264.880.000,00	1.791.735.729.236,00
Ditjen Bina Upaya Kesehatan	18.852.255.673,00	16.246.097.578.241,00	2.717.469.698.000,00	2.332.003.122.054,00	16.134.785.975.000,00	13.914.094.456.187,00
Ditjen PP dan PL	2.697.326.439,00	2.245.508.557.640,00	18.852.255.673.000,00	16.237.568.543.344,00	(16.154.929.234.000,00)	(13.992.059.985.704,00)
Ditjen Binfar dan Alkes	1.863.969.679,00	1.768.111.736.232,00	2.697.326.439.000,00	2.244.851.062.340,00	(833.356.760.000,00)	(476.739.326.108,00)
Badan Litbang Kesehatan	759.126.196,00	552.341.800.113,00	1.863.359.082.000,00	1.767.501.139.232,00	(1.104.232.886.000,00)	(1.215.159.339.119,00)
Badan PPSDM Kesehatan	3.060.790.867,00	2.719.954.630.930,00	3.060.790.867.000,00	2.719.954.630.840,00	-	90,00
Jumlah	54.337.519.430,00	48.852.631.450.598,00	54.326.329.360.000,00	48.824.391.971.035,00	11.190.070.000,00	28.239.479.563,00
					0,02%	0,06%

Hasil koreksi Neraca per 31 Desember 2015 menurut Unit Eselon I, sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Koreksi Neraca per 31 Desember 2015 Menurut Unit Eselon I

(dalam rupiah)

Kode	Unit Eselon I	31 Desember 2015	Koreksi Audit		31 Desember 2015
		Unaudited	Debet	Kredit	Audited
01	Sekretariat Jenderal	1.767.178.915.746,00	98.153.426.438,00	91.693.046.238,00	1.760.718.535.546,00
02	Inspektorat Jenderal	9.561.938.247,00	-	-	9.561.938.247,00
03	Ditjen Bina Gizi dan KIA	355.105.231.680,00	90.627.606.358,00	81.556.647.017,00	346.034.272.339,00
04	Ditjen Bina Upaya Kesehatan	31.724.512.436.337,00	1.143.730.180.419,00	1.155.688.404.519,00	31.736.470.660.437,00
05	Ditjen PP dan PL	3.784.641.155.043,00	913.574.885.159,00	304.800.293.965,00	3.175.866.563.849,00
07	Ditjen Binfar dan Alkes	166.776.565.647,00	23.057.168.269,00	6.880.031.994,00	150.599.429.372,00
11	Badan Litbang Kesehatan	768.952.418.415,00	29.734.715.931,00	26.310.176.611,00	783.527.879.095,00
12	Badan PPSDM Kesehatan	7.280.444.553.180,00	287.314.496.132,00	265.873.033.320,00	7.259.003.090.368,00
	Jumlah	45.857.173.214.295,00	2.586.192.478.706,00	1.932.801.633.663,00	45.221.782.369.253,00

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Neraca Kemenkes per 31 Desember 2015 (*Unaudited*) dengan total Aset sebesar Rp45.875.173.214.295,00 mengalami koreksi/penyesuaian hasil audit berupa penambahan sebesar Rp2.586.192.478.706,00 dan pengurangan sebesar Rp1.932.801.633.663,00 sehingga Neraca Kemenkes per 31 Desember 2015 (*Audited*) menjadi sebesar Rp45.221.782.369.253,00.

Ringkasan Neraca Kemenkes per 31 Desember 2015 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut :

Tabel 7
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2015		Koreksi
	Audited	Unaudited	
Aset			
Aset Lancar	5.853.058.939.701,00	5.847.139.787.294,00	5.919.152.407,00
Aset Tetap	38.772.063.438.275,00	38.885.726.176.577,00	(113.662.938.302,00)
Piutang Jangka Panjang	2.708.447.093,00	2.714.303.097,00	(5.856.004,00)
Aset Lainnya	593.951.544.184,00	1.139.592.747.327,00	(545.641.203.143,00)
Jumlah Aset	45.221.782.369.253,00	45.875.173.014.295,00	(653.390.845.042,00)
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	1.060.072.481.404,00	1.039.000.034.347,00	21.072.447.057,00
Ekuitas Dana	44.161.709.887.849,00	44.836.173.179.948,00	(674.463.292.099,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	45.221.782.369.253,00	45.875.173.214.295,00	(653.390.845.042,00)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas Neraca Kemenkes per 31 Desember 2015, yaitu terdapat pengurangan aset sebesar Rp653.390.845.042,00 atau berkurang 1,42%, dengan komposisi perubahan masing-masing yaitu :

- 1) Aset Lancar, bertambah sebesar Rp5.919.152.407,00 atau 0,10%;
- 2) Aset Tetap (*Netto*), berkurang sebesar Rp113.662.938.302,00 atau 0,03%;
- 3) Aset Lainnya (*Netto*) berkurang sebesar Rp545.641.203.143,00 atau 47,9%;
- 4) Kewajiban bertambah sebesar Rp21.072.447.057,00 atau 2,03%;
- 5) Ekuitas dana berkurang sebesar Rp674.463.292.099,00 atau 0,15%.